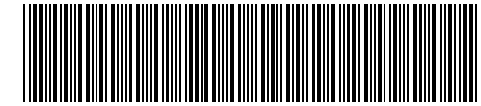




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408779/2021**



DS:9656-9766-4402-5802

Revisi ke 01

Tanggal : 11 Februari 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (19) | SULAWESI SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408779) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
| Sebesar | : Rp. | 2.523.383.000 (DUA MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.523.383.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN MAKASSAR II | (136) Rp. | 2.523.383.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

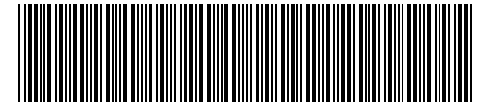
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021

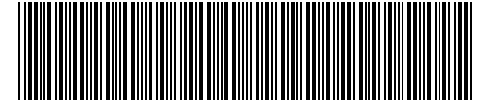


DS:9656-9766-4402-5802

Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	88.609.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	88.609.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.434.774.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	2.434.774.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



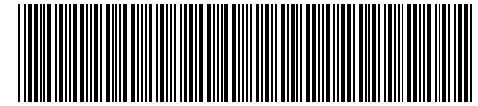
DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			88.609.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			88.609.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	88.609.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	88.609.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.434.774.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			2.434.774.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,00	Lembaga	88.690.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	88.690.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	155.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	128.200.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	26.800.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		20,00	Lembaga	76.324.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		20,00	Lembaga	76.324.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		20,00	Lembaga	80.000.000
Rincian Output		:	01 PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	(PN)	20,00	Lembaga	80.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		217,00	Orang	1.736.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	217,00	Orang	1.736.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		28,00	Kelompok Masyarakat	298.760.000
Rincian Output		:	01 QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	28,00	Kelompok Masyarakat	298.760.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

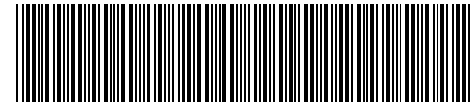
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021

I B. SUMBER DANA



DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	2.523.383.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.523.383.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



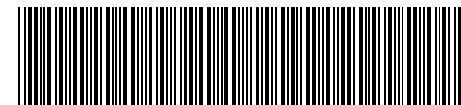
DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	2.523.383	-	-	-	2.523.383		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	88.609	-	-	-	88.609		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	88.609	-	-	-	88.609		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	88.609	-	-	-	88.609	19.00	
01	RM	-	88.609	-	-	-	88.609	136	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.434.774	-	-	-	2.434.774		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	2.434.774	-	-	-	2.434.774		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	88.690	-	-	-	88.690	19.00	
01	RM	-	88.690	-	-	-	88.690	136	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	155.000	-	-	-	155.000	19.51	
01	RM	-	155.000	-	-	-	155.000	136	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	76.324	-	-	-	76.324	19.00	
01	RM	-	76.324	-	-	-	76.324	136	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	80.000	-	-	-	80.000	19.00	
01	RM	-	80.000	-	-	-	80.000	136	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	1.736.000	-	-	-	1.736.000	19.00	
01	RM	-	1.736.000	-	-	-	1.736.000	136	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	298.760	-	-	-	298.760	19.00	
01	RM	-	298.760	-	-	-	298.760	136	
JUMLAH		-	2.523.383	-	-	-	2.523.383		

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

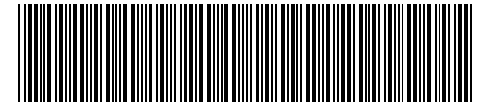
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	50.468	157.290	192.780	200.017	232.215	195.520	257.270	197.654	289.449	260.100	490.620	2.523.383
		BELANJA BARANG	0	50.468	157.290	192.780	200.017	232.215	195.520	257.270	197.654	289.449	260.100	490.620	2.523.383
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	0	18.500	6.000	18.500	6.000	18.500	8.150	12.959	0	0	88.609
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	18.500	6.000	18.500	6.000	18.500	8.150	12.959	0	0	88.609
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	50.468	157.290	174.280	194.017	213.715	189.520	238.770	189.504	276.490	260.100	490.620	2.434.774
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	50.468	157.290	174.280	194.017	213.715	189.520	238.770	189.504	276.490	260.100	490.620	2.434.774

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
IV A. B L O K I R**



DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

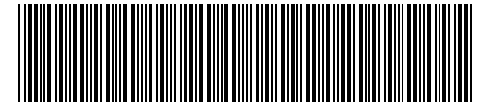
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:9656-9766-4402-5802

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003